

# JAWA POS

RADAR MADIUN

## RADAR MAGETAN

Rabu, 2 Maret 2022

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto  
(Bupati Magetan)

### Percepatan Dana Desa

**MENGAPA** pencairan dana desa harus dipercepat? Ini pertanyaan yang wajar. Juga wajar ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan setiap saat agar anggaran segera diserap di berbagai tingkatan pemerintahan. Termasuk dana desa yang jumlahnya juga besar.

Bayangkan, untuk 2022 saja, dana desa ditetapkan pemerintah sebesar Rp 68 triliun untuk 74.961 desa. Turun sebesar Rp 4 triliun dibandingkan tahun lalu. Sejak 2015, dana desa sudah disalurkan sebesar Rp 400,1 triliun. Melebihi jumlah APBN 2005 senilai Rp 397,8 triliun.

Selama tujuh tahun penyaluran dana desa, banyak infrastruktur terbangun. Mulai jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, dan lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Di Jawa Timur (Jatim) terdapat 7.721 desa penerima dengan nilai total dana desa Rp 7,7 triliun. Tersebar di 30 kabupaten/kota. Satu-satunya kota yang memiliki desa hanya Kota Batu. Bila secara keseluruhan dana desa turun, khusus Jatim tahun ini justru naik Rp 100,2 miliar.

Tentu uang sebesar itu jika beredar di desa akan sangat bermakna. Apalagi digunakan untuk pembangunan atau program lain dengan menggunakan sumber daya di desa. Minimal menggunakan sumber daya di kabupaten setempat. Tentu uang akan beredar dengan cepat.

Magetan memiliki 207 desa dan 28 kelurahan. Jumlah dana desa di Kabupaten Magetan Rp 171,22 miliar. Hampir sama dengan PAD Magetan yang hanya sekitar Rp 200 miliar setahun. ▶ *Baca Percepatan... Hal.19*

*Sambungan dari Hal.16*

Tentu dana desa sebesar itu sangat bermakna bagi perputaran roda ekonomi di desa.

Pada 24 Februari 2022 lalu, bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya, bupati/wali kota di Jawa Timur diundang mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pencairan Dana Desa Tahun 2022. Menteri Desa dan gubernur Jatim hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Gubernur meminta kami terus mendorong percepatan pencairan dana desa. Selain percepatan pembangunan, dana desa terbukti mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Terbukti untuk periode Maret-September 2021, angka kemiskinan di Jatim turun 0,81 persen atau setara dengan 313.130 jiwa. Ini rekor terbesar secara nasional.

Dalam arahnya, Menteri Desa menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Januari 2022, belum semua desa di Jatim mencairkan dana desa. Baru 1.839 desa atau 23 persen yang telah mencairkan. Menteri juga mendorong agar pencairan dana desa dipercepat.

Memang banyak kendala yang

dihadapi masing-masing daerah dalam mempercepat pencairan. Terutama di luar Jawa. Untuk mempercepat gairah, tahun ini masing-masing kabupaten/kota yang paling cepat mencairkan dana desa diberikan piagam penghargaan. Di tingkat nasional, Jatim tergolong yang tercepat dalam mencairkan dana desa.

Ada empat kabupaten yang memperoleh penghargaan dari gubernur Jatim. Kabupaten Madiun (tercepat nasional) sebanyak 198 desa. Disusul Kabupaten Tulungagung (tercepat di Jatim) sebanyak 257 desa. Kemudian Kabupaten Blitar sebanyak 118 desa dan Kabupaten Magetan sebanyak 73 desa.

Sejak awal menjadi bupati, saya selalu berpesan kepada DPMD, BPPKAD, serta camat untuk terus mendorong desa agar proaktif. Percepatan pencairan dana desa sangat penting. Bahkan saya sering mengatakan, "*zalim rasanya kalau kita diberikan kewenangan untuk mempercepat pencairan uang rakyat agar cepat beredar di masyarakat, justru kita tidak melakukannya.*" Dinas terkait memfasilitasi serta memberi

advokasi supaya kendala dapat ditekan. Alhamdulillah tahun ini menjadi empat daerah tercepat dalam mencairkan dana desa di Jatim.

Kita semua ingat dengan istilah Trilogi Pembangunan di era Orde Baru. Stabilitas ditempatkan pada urutan pertama. Disusul pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan. Karena stabilitas sebagai panglima dan pemerataan pada skala terakhir, jangan heran bila di era Orde Baru, 70 persen uang hanya beredar di Jakarta.

Bayangkan, di Indonesia yang begitu luas ini, mayoritas uang beredar di Jakarta. Semua fasilitas akhirnya menumpuk. Semua orang urbanisasi ke ibu kota. Jakarta bak madu yang menghipnotis semua warga. Ingin sukses berkarier, terkenal, dan berbisnis, harus ke Jakarta.

Reformasi mengoreksi semua itu. Pemerintah daerah diberi otonomi lebih luas. Kewenangan yang lebih besar itu juga diikuti pemberian sumber-sumber keuangannya. Mulai terlihat gairah membangun di daerah-daerah. Peredaran uang di daerah menjadi lebih baik.

Menurut catatan sejarah, oto-

nomi justru sudah lama diterapkan di desa. Bahkan, cara pemilihan secara langsung dimulai dari desa. Sejak zaman penjajahan, kepala desa sudah dipilih langsung. Waktu itu perempuan belum boleh dipilih sebagai kepala desa. Hanya laki-laki yang berhak. Namun, sejak dulu warga diberi kebebasan dalam memilih kepala desanya, tapi tidak dengan sumber keuangannya. Jangan heran bila desa (secara politik) memang diminta selalu menengadahkan tangannya untuk membiayai pembangunan.

Tahun 2015 menjadi titik balik. Tahun pertama dimulainya pemberian dana desa. Sebagai amanat UU 6/2014 tentang Desa. Dana tersebut membuat desa menjadi berdaya membiayai program prioritasnya. Agar masyarakat desa menentukan masa depannya. Agar uang segera beredar di desa. Perkara adanya penyimpangan dana desa, biar penegak hukum yang menegakkan. Jangan menjadi alasan untuk menariknya kembali. Jika itu dilakukan, tentu merupakan sebuah kemunduran. Juga tidak perlu dilakukan oleh rezim siapa pun. (\*/\*naz/c1)